

**ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

ROMIANO ROMUAL YONATHAN SIMANGUNSONG
NPM. 22071010259

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026

**ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)**



SKRIPSI

Skrripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Ditulis Oleh :

ROMIANO ROMUAL YONATHAN SIMANGUNSONG

NPM. 22071010259

Kepada

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, 3 Juni 2026

Penyusun,

Romiano Romual Yonathan Simangunsong

NPM. 22071010259

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)**

Penyusun,

Romiano Romual Yonathan Simangunsong

NPM. 22071010259

Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari

, tanggal

Juli 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Sekretaris

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)**

Penyusun,

Romiano Romual Yonathan Simangunsong

NPM. 22071010259

Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026,

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.

NIP. 19750708 202121 2 001

Sekretaris,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.

NIP. 19950608 202406 1 002

Anggota,

Miko Aditiva Suharto, S.H., M.H.

NIP. 19910721 202406 1 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

NIP. 19930403 201903 2 029

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romiano Romual Yonathan Simangunsong
NPM : 22071010259
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga pendidikan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 3 Juni 2026

Penyusun.



Romiano Romual Yonathan Simangunsong
NPM. 22071010259

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby).”**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta sebagai bentuk usulan penelitian skripsi yang akan penulis laksanakan. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berperan dalam proses penyusunan serta pelaksanaan skripsi, antara lain :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta, C.P. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang penulis telah dengan sangat baik membimbing dan memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan tanpa henti kepada penulis;
7. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis;
8. Bapak Miko Aditya Suharto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
11. Teman-teman penulis yang selalu membantu, menghibur, dan menemani penulis;
12. Dohardo Amadeus Simangunsong sebagai saudara sepupu yang penulis sayangi. Segala pencapaian yang penulis raih didedikasikan kepada saudaraku yang selalu mengawasi dan menemani penulis.

13. Yulvris Robinsardi Simangunsong dan Suzan Yunita Simanjuntak sebagai orang tua penulis, Patricia Yessy Davina sebagai kakak penulis, dan keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi penulis;

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juni 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Romiano Romual Yonathan Simangunsong
NPM : 22071010259
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Maret 2005
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS KEKABURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN GUGATAN CAMPURAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mewajibkan setiap sengketa ketenagakerjaan menempuh tahap bipartit dan mediasi sebagai syarat formil sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), namun UU tersebut tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian gugatan gabungan yang mencakup lebih dari satu jenis perselisihan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby yang menggabungkan perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kekaburan hukum ini menimbulkan permasalahan mengenai apakah ketiadaan pengaturan pemisahan objek sengketa dapat menghambat perlindungan hak pekerja, serta bagaimana seharusnya hakim menafsirkan hukum untuk mengatasi kekosongan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk kekaburan hukum dalam UU PPHI serta merumuskan pola penafsiran hukum yang tepat bagi hakim PHI dalam memutus gugatan gabungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat deskriptif-analitis, serta didukung studi kepustakaan dan landasan teori mengenai perlindungan hak pekerja dan penggabungan gugatan (*samenvoeging van vordering*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena menafsirkan Pasal 86 UU PPHI mensyaratkan seluruh objek sengketa telah memenuhi mediasi secara utuh, sehingga ketidaklengkapan pada satu objek menggugurkan keseluruhan gugatan. Upaya hukum yang tepat bagi pekerja bukanlah kasasi, melainkan pengajuan gugatan baru secara terpisah dan penempuhan mediasi ulang bagi objek yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: Gugatan Gabungan; Perselisihan Hubungan Industrial; *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.)

ABSTRACT

Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement (UU PPHI) requires every labor dispute to undergo bipartite and mediation stages as a formal requirement before being submitted to the Industrial Relations Court (PHI). However, the law does not explicitly regulate the settlement mechanism for joint lawsuits (samenvoeging van vordering) that encompass more than one type of dispute, as reflected in Decision Number 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby, which combined disputes over rights and termination of employment (PHK). This legal ambiguity raises questions regarding whether the absence of regulations on the separation of dispute objects can hinder the protection of workers' rights, as well as how judges should interpret the law to address this legal vacuum. This study aims to analyze the forms of legal ambiguity in the UU PPHI and formulate appropriate legal interpretation patterns for PHI judges in deciding joint lawsuits. Utilizing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this descriptive-analytical research is supported by a literature review alongside theoretical frameworks on the protection of workers' rights and the joinder of claims. The results indicate that the Panel of Judges declared the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) because they interpreted Article 86 of the UU PPHI as requiring all dispute objects to have fully satisfied the mediation process; thus, an incompleteness in one object invalidates the entire lawsuit. Consequently, the appropriate legal remedy for the workers is not an appeal to the Supreme Court (kasasi), but rather filing a new, separate lawsuit and re-undergoing mediation for the unfulfilled object.

Keywords: *Combined Lawsuit; Industrial Relations Dispute; Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O.)*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3. Bahan Hukum	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	19

1.6.5.	Analisis Bahan Hukum	21
1.6.6.	Sistematika Penulisan	22
1.7.	Tinjauan Pustaka	24
1.7.1.	Tinjauan Umum tentang Pihak yang Terkait dalam Hubungan Industrial	24
1.7.2.	Tinjauan Umum tentang Perselisihan Hubungan Industrial	27
1.7.3.	Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	31
1.7.4.	Tinjauan Umum tentang Gugatan	34
1.7.5.	Tinjauan Umum tentang Interpretasi Hakim.....	39
 BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby)		41
2.1	Analisis Perlindungan Bagi Pekerja Putusan Nomor 104/Pdt.SusPHI/2023/PN Sby.....	43
2.2	Analisis <i>Ratio Decidendi</i>/ Pertimbangan Hakim dalam Menangani Kasus Putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.....	52
 BAB III ANALISIS UPAYA PARA PEKERJA/ PENGGUGAT UNTUK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA		64
3.1	Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	65
3.2	Upaya Para Pekerja/ Penggugat Setelah Gugatan Tidak Dapat Diterima	77

BAB IV PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian	9
--	----------

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	65
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat Tes English Proficiency Test (EPT)	94
Lampiran 2 Transkrip Nilai	95
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	96
Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi	97
Lampiran 5 Formulir Ajuan Judul Skripsi	99
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT	100
Lampiran 7 Bukti KRS Terbaru	101
Lampiran 8 Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	102
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	103
Lampiran 10 Sertifikat Library Class	104
Lampiran 11 Hasil Uji Turnitin Skripsi	105
Lampiran 12 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	106
Lampiran 13 Hasil Uji Turnitin Jurnal	107
Lampiran 14 Bukti LoA Jurnal	108
Lampiran 15 Bukti Pendaftaran Ujian Lesan	109
Lampiran 16 Lembar Revisi Dosen Penguji I	110
Lampiran 17 Lembar Revisi Dosen Penguji II	111
Lampiran 18 Lembar Revisi Dosen Penguji III	112